

Batas Negara dan Advokasi Kebijakan Pembangunan: Dinamika, Tantangan, dan Strategi Penguatan

Siska Rina^{1*}, Aldri Frinaldi², Asnil³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
email: siskarina8782@gmail.com

Abstract

Border management in Indonesia has largely been dominated by a traditional security approach, often overlooking crucial aspects such as poverty reduction, economic growth, and environmental sustainability. This study aims to analyze the dynamics, challenges, and strategies for strengthening border development policies by integrating security, welfare, and ecological perspectives. The method employed is qualitative through a literature review of policy documents, state boundary theories, and relevant legislation. The findings indicate that border governance from Sabang to Merauke is coordinated by the National Border Management Agency (BNPP) under Presidential Regulation No. 12 of 2010, involving the synergy of 27 Ministries/Agencies. However, challenges such as sectoral ego, illegal cross-border activities, and infrastructure gaps continue to hinder development effectiveness. Recommended strategies include accelerating infrastructure development such as Cross-Border Posts (PLBN), empowering local community economies, effective border diplomacy, and policy advocacy that balances territorial sovereignty with community welfare.

Keywords: *State Boundaries, Security, Poverty, BNPP, Development Policy*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Batas negara merupakan manifestasi utama dari kedaulatan sebuah bangsa yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas teritorial dari ancaman luar. Dalam perspektif keamanan tradisional, wilayah perbatasan sering dipandang sebagai garis depan pertahanan militer yang rawan terhadap konflik dan agresi asing (Prescott, 2014). Namun, dinamika global saat ini telah menggeser ancaman menjadi bersifat non-tradisional seperti penyelundupan senjata, terorisme, dan perdagangan manusia yang marak di garis batas. Lemahnya pengawasan fisik di ribuan kilometer batas darat dan laut Indonesia menjadi celah bagi masuknya ancaman keamanan transnasional tersebut. Oleh karena itu, pendekatan keamanan (*security approach*) mutlak diperlukan namun tidak boleh berdiri sendiri tanpa pendekatan lain. Dalam perspektif *border studies*,

batas negara dipahami tidak hanya sebagai garis demarkasi teritorial statis, tetapi sebagai ruang hidup dinamis yang mempertemukan kedaulatan dengan dinamika sosial-ekonomi (Newman, 2006). Secara tradisional, perbatasan dipandang sebagai garis depan pertahanan militer yang rawan terhadap agresi asing. Oleh karena itu, *border studies* menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dengan perlindungan ruang hidup masyarakat lokal.

Selain isu keamanan, wilayah perbatasan di Indonesia identik dengan kantong-kantong kemiskinan yang kronis akibat isolasi geografis yang ekstrem. Masyarakat di kawasan ini sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih (Bangun & Kinanti, 2024). Tingginya angka kemiskinan di beranda negara ini menjadi paradoks bagi cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketertinggalan ini membuat masyarakat perbatasan rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan sosial oleh pihak asing. Penanggulangan kemiskinan di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas nasional untuk mencegah disintegrasi sosial.

Aspek pertumbuhan ekonomi juga menjadi sorotan tajam karena terjadinya ketimpangan pembangunan yang mencolok antara pusat dan daerah pinggiran. Selama berpuluh tahun, model pembangunan yang sentralistik menyebabkan wilayah perbatasan hanya menjadi halaman belakang yang tidak tersentuh investasi (Mutaqin, 2019). Potensi sumber daya alam yang melimpah di perbatasan sering kali diangkut ke pusat tanpa memberikan nilai tambah ekonomi bagi penduduk lokal. Padahal, jika dikelola dengan baik, perbatasan dapat bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pintu gerbang ekspor nasional. Strategi pertumbuhan yang inklusif sangat dibutuhkan untuk mengubah wajah perbatasan yang suram.

Ketimpangan ekonomi ini semakin terlihat nyata ketika membandingkan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yang jauh lebih maju secara infrastruktur. Warga negara Indonesia di perbatasan Kalimantan sering kali lebih bergantung pada produk dan layanan dari Malaysia karena alasan kedekatan dan ketersediaan barang (Puryanti, 2017). Fenomena ketergantungan ekonomi ini dapat menggerus rasa nasionalisme dan menciptakan loyalitas ganda di kalangan warga perbatasan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan harus dipacu agar Indonesia memiliki daya saing dan martabat di hadapan negara tetangga. Tanpa percepatan ekonomi, kedaulatan negara dipertaruhkan bukan melalui perang, melainkan melalui dominasi ekonomi asing.

Di sisi lain, isu lingkungan hidup menjadi permasalahan krusial yang sering terabaikan dalam diskursus pengelolaan batas negara. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, seperti pembalakan liar dan penambangan tanpa izin, marak terjadi di kawasan hutan perbatasan yang minim pengawasan. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga memicu bencana ekologis yang berdampak pada masyarakat setempat. Perubahan iklim juga menambah kerentanan wilayah perbatasan, terutama

pulau-pulau kecil terluar yang terancam tenggelam akibat kenaikan muka air laut. Oleh sebab itu, pembangunan perbatasan harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Kompleksitas masalah di atas menuntut adanya advokasi kebijakan yang kuat untuk mengubah paradigma pengelolaan perbatasan. Kebijakan yang selama ini bersifat sektoral dan tumpang tindih perlu diintegrasikan ke dalam satu kerangka kerja yang komprehensif dan kolaboratif. Advokasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa suara masyarakat perbatasan didengar dalam proses perencanaan pembangunan nasional (Nugraha, 2018). Tanpa advokasi yang efektif, kebutuhan riil masyarakat akan terus tertutup oleh agenda-agenda elit yang bias perkotaan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil adalah kunci keberhasilan kebijakan ini.

Implementasi kebijakan perbatasan yang kompleks sangat relevan dianalisis menggunakan teori *multi-level governance*. Konsep ini menitikberatkan pada koordinasi lintas aktor dan level pemerintahan untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat pembangunan (Hooghe & Marks, 2010). Di Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjalankan peran sebagai koordinator utama atau "dirigen" yang mensinergikan tugas dari 27 Kementerian dan Lembaga (K/L). Sinergi ini mencakup berbagai dimensi mulai dari pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan yang harus diimplementasikan secara terpadu di lokasi prioritas (Ladiqi et al., 2021).

Dalam kerangka *multi-level governance*, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial, terutama terkait kapasitas fiskal dan wewenang. Banyak daerah perbatasan memiliki anggaran (APBD) terbatas, sehingga sulit untuk membangun infrastruktur dasar secara mandiri. Hal ini menuntut adanya intervensi pusat melalui skema pendanaan afirmatif dan koordinasi yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menyentuh eksekusi program di lapangan. Tata kelola yang efektif dalam model ini harus mampu menciptakan sinkronisasi antara perencanaan nasional dengan kebutuhan spesifik di tingkat kecamatan perbatasan.

Selanjutnya, *policy advocacy* (advokasi kebijakan) diperlukan untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini bersifat sentralistik menjadi lebih inklusif (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Advokasi ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan riil masyarakat perbatasan, yang sering terisolasi secara geografis, didengar dalam proses perencanaan nasional. Tanpa advokasi yang efektif, agenda pembangunan berisiko terjebak pada bias perkotaan yang mengabaikan karakteristik unik wilayah pinggiran. Oleh karena itu, penguatan advokasi kebijakan menjadi jaminan bahwa pembangunan perbatasan tetap menjadi prioritas strategis nasional.

Tantangan pengelolaan batas negara semakin berat dengan adanya desentralisasi yang memberikan wewenang lebih besar kepada daerah namun sering terkendala kapasitas fiskal. Banyak pemerintah daerah di wilayah perbatasan yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas sehingga sulit membangun infrastruktur dasar. Keterbatasan ini

menuntut adanya intervensi khusus dari pemerintah pusat melalui skema pendanaan yang afirmatif. Koordinasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam pembangunan perbatasan. Kebijakan fiskal yang asimetris mungkin diperlukan untuk mempercepat pembangunan di kawasan tertinggal ini.

Dalam konteks hubungan internasional, batas negara adalah titik temu diplomasi yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan cerdas. Sengketa batas yang belum terselesaikan dapat menghambat kerja sama ekonomi dan memicu ketegangan diplomatik antarnegara (Haller-Trost, 1995). Indonesia harus mampu menggunakan instrumen diplomasi perbatasan untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga perdamaian kawasan. Diplomasi tidak hanya soal garis batas, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya bersama dan penanganan kejahatan lintas negara. Keberhasilan diplomasi perbatasan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika, tantangan, dan strategi penguatan kebijakan pembangunan perbatasan. Penelitian ini secara spesifik akan menyoroti integrasi aspek keamanan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini bertujuan memperkuat literatur mengenai tata kelola perbatasan yang adaptif dan manusiawi. Fokus akhirnya adalah mewujudkan perbatasan sebagai sabuk pengaman dan pusat kesejahteraan bangsa.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk memahami fenomena pengelolaan batas negara secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan kompleksitas kebijakan yang tidak dapat diukur sekadar dengan angka statistik (Creswell & Poth, 2018). Fokus penelitian diarahkan pada analisis dokumen hukum, kebijakan publik, dan teori-teori pembangunan yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkategorisasi tema-tema utama seperti keamanan, kesejahteraan, dan kelembagaan untuk kemudian disintesis menjadi temuan yang komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara geografis, Indonesia memiliki posisi strategis dengan garis batas yang membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur.

Batas darat Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (Susilo et al., 2024). Panjang garis perbatasan darat ini mencapai ribuan kilometer dengan kondisi topografi yang bervariasi mulai dari hutan lebat hingga pegunungan terjal. Kondisi geografis yang sulit ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penyediaan infrastruktur. Memahami karakteristik fisik setiap segmen batas adalah langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Selain batas darat, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki batas laut dengan sepuluh negara tetangga yang mengelilinginya. Negara-negara tersebut adalah India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste (Kurniawan, 2021). Pengelolaan batas maritim ini sangat krusial mengingat potensi kekayaan laut dan posisi silang lalu lintas perdagangan dunia. Sengketa batas laut, seperti tumpang tindih klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), masih sering terjadi dan memerlukan penanganan diplomatik yang intensif. Pengamanan laut membutuhkan sumber daya yang besar dan teknologi pemantauan yang canggih.

Dalam teori *Borderlands*, perbatasan tidak lagi dilihat sebagai tembok pemisah, melainkan sebagai ruang hidup (*living space*) dengan identitas hibrid yang unik. Praktik keseharian masyarakat perbatasan, seperti perdagangan barter tradisional dan pernikahan lintas batas, mencerminkan fleksibilitas identitas yang melampaui batas administratif (Puryanti, 2017). Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari model ASEAN lainnya, seperti kerja sama Thailand-Myanmar dalam zona ekonomi khusus atau patroli maritim bersama Filipina-Malaysia. Pembelajaran utamanya adalah keberhasilan tata kelola bergantung pada kemampuan negara mentransformasi wilayah konflik menjadi koridor ekonomi yang inklusif.

Untuk mengelola kompleksitas wilayah perbatasan tersebut, pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai koordinator utama. BNPP dibentuk berdasarkan mandat UU No. 43 Tahun 2008 dan diperkuat operasionalnya melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2010. Lembaga ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan bertugas menyusun rencana induk serta rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara. Kehadiran BNPP diharapkan dapat menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat pembangunan di kawasan perbatasan. BNPP menjadi "dirigen" dalam orkestrasi pembangunan perbatasan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbatasan di bawah koordinasi BNPP melibatkan 27 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan. Kementerian tersebut mencakup Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pendidikan, dan lain-lain (Bangun & Kinanti, 2024). Keterlibatan banyak instansi ini menunjukkan bahwa isu perbatasan adalah isu multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Sinergi ke-27 K/L ini

diwujudkan dalam program prioritas tahunan yang menysasar kecamatan-kecamatan lokasi prioritas (Lokpri). Koordinasi yang efektif antar kementerian menjadi kunci suksesnya implementasi program di lapangan.

Dinamika pengelolaan batas negara sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang pembentukan negara yang mewarisi batas-batas kolonial Hindia Belanda dan Inggris. Perjanjian tahun 1891 dan 1915 antara Inggris dan Belanda, misalnya, masih menjadi rujukan utama dalam penentuan batas di Kalimantan (Wangke, 2018). Sejarah ini sering menyisakan persoalan teknis di lapangan karena patok batas yang hilang atau rusak termakan usia. Dinamika sosial budaya masyarakat yang terbelah oleh garis batas kolonial juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan kedaulatan. Memahami konteks historis sangat penting untuk menyelesaikan sengketa batas secara damai.

Dinamika kawasan Asia Tenggara juga turut membentuk pola pengelolaan batas negara Indonesia saat ini. Integrasi ekonomi ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut perbatasan yang lebih terbuka bagi arus barang dan jasa. Namun, keterbukaan ini juga membawa risiko keamanan yang harus diantisipasi dengan ketat. Hubungan bilateral yang pasang surut dengan negara tetangga sering kali mempengaruhi stabilitas di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, kebijakan perbatasan harus adaptif terhadap perubahan geopolitik regional.

Tantangan utama dari aspek keamanan adalah masih maraknya kejahatan lintas negara atau *transnational organized crime*. Penyelundupan narkoba melalui jalur tikus di perbatasan Kalimantan dan Sumatera menjadi ancaman serius bagi generasi muda bangsa ((Vanya, 2024). Selain itu, ancaman terorisme dan radikalisme juga memanfaatkan celah keamanan di perbatasan laut yang luas. Lemahnya sarana dan prasarana pengawasan menjadi kendala utama dalam membendung aktivitas ilegal tersebut. Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dini sangat diperlukan.

Tantangan berikutnya adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih tinggi di kawasan perbatasan dibandingkan wilayah lain. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di banyak kabupaten perbatasan menunjukkan belum meratanya hasil pembangunan (Mutaqin, 2019). Minimnya lapangan kerja memaksa banyak warga perbatasan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di negara tetangga dengan perlindungan hukum yang lemah. Ketergantungan ekonomi pada negara tetangga membuat nilai tukar Rupiah sering kali kalah dominan dibandingkan mata uang asing di wilayah sendiri. Hal ini merupakan tantangan nyata bagi kedaulatan ekonomi Indonesia.

Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi tantangan klasik yang menghambat konektivitas dan distribusi logistik ke wilayah perbatasan. Biaya transportasi yang mahal menyebabkan harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi, membebani ekonomi masyarakat setempat. Meskipun pembangunan jalan inspeksi patroli perbatasan dan jalan trans telah dilakukan,

akses menuju desa-desa terpencil masih sangat sulit (Suryono, 2023). Ketiadaan akses telekomunikasi dan internet di beberapa titik *blank spot* semakin mengisolasi masyarakat dari dunia luar. Pembangunan infrastruktur fisik dan digital harus terus digenjot untuk membuka isolasi wilayah.

Isu lingkungan hidup menjadi tantangan jangka panjang yang mengancam keberlanjutan wilayah perbatasan. Aktivitas *illegal logging* dan *illegal mining* di perbatasan Kalimantan dan Papua sering kali melibatkan jaringan lintas negara. Kerusakan hutan di hulu sungai berdampak pada banjir yang merugikan masyarakat di hilir. Selain itu, pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal asing di perbatasan laut merugikan nelayan lokal dan merusak ekosistem terumbu karang. Penegakan hukum lingkungan yang tegas dan kerja sama konservasi lintas negara menjadi solusi yang mendesak.

Strategi penguatan pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pos pemeriksaan imigrasi dan bea cukai, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru (Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan 2020–2024, 2022). Pembangunan pasar dan sarana pendukung di sekitar PLBN bertujuan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. PLBN yang megah juga menjadi etalase harga diri bangsa di mata negara tetangga. Transformasi PLBN mengubah wajah perbatasan dari seram menjadi ramah dan modern.

Strategi kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan lokal yang berorientasi ekspor. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi investor yang ingin membangun industri pengolahan di perbatasan. Program dana desa harus dioptimalkan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mampu berdagang lintas batas secara legal (Bangun & Kinanti, 2024). Pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi UMKM di perbatasan harus diperluas. Ekonomi yang kuat akan menjadi benteng pertahanan non-militer yang efektif.

Strategi ketiga adalah penguatan diplomasi perbatasan melalui forum *General Border Committee* (GBC) dan forum kerja sama bilateral lainnya. Diplomasi harus diarahkan untuk mempercepat penyelesaian segmen batas yang masih bersengketa (*Unresolved Segments*) guna memberikan kepastian hukum (Raharjo & Idris, 2025). Kerja sama sosial ekonomi seperti Malindo (Malaysia-Indonesia) dan Sosek Malindo harus ditingkatkan manfaatnya bagi masyarakat lokal. Diplomasi lunak (*soft diplomacy*) melalui pertukaran budaya dan pendidikan juga penting untuk membangun saling percaya. Hubungan baik dengan tetangga adalah modal keamanan yang paling murah.

Strategi keempat adalah pemanfaatan teknologi informasi dan data geospasial dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan perbatasan. Penggunaan *drone*, satelit, dan sensor canggih dapat mengatasi keterbatasan personel dalam mengawasi garis batas yang panjang (Sulaiman et al., 2023). Integrasi data satu peta (*One Map Policy*) diperlukan agar tidak terjadi tumpang

tindih lahan dan perizinan di kawasan perbatasan. Digitalisasi pelayanan publik di perbatasan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Teknologi menjadi *force multiplier* dalam manajemen perbatasan modern.

Strategi kelima adalah penguatan advokasi kebijakan dan kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media. Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2010, BNPP harus menjadi motor penggerak koordinasi yang lebih cair dan tidak kaku secara birokratis. Pelibatan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam menjaga patok batas dan keamanan lingkungan sangat strategis (Nugroho & Harahap, 2023). Masyarakat adat sering kali menggunakan hukum adat sebagai instrumen advokasi untuk menjaga kedaulatan wilayah sekaligus identitas budaya mereka dari tekanan luar. Inklusivitas ini memastikan bahwa kebijakan perbatasan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi aspirasi masyarakat bawah sebagai aktor utama di garis depan kedaulatan negara. Advokasi diperlukan untuk memastikan anggaran pembangunan perbatasan tidak dipotong dan tetap menjadi prioritas nasional. Kolaborasi adalah kunci untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang kompleks dan multidimensi.

Kesimpulan

Kesimpulan Pengelolaan batas negara di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup aspek keamanan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan. Dari Sabang sampai Merauke, batas negara bukan sekadar garis demarkasi, melainkan ruang hidup yang dinamis. BNPP, berdasarkan mandat UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010, memegang peran sentral dalam mengoordinasikan 27 Kementerian/Lembaga untuk membangun perbatasan. Dinamika geopolitik dan sejarah kolonial menuntut strategi yang adaptif, mulai dari pembangunan PLBN hingga diplomasi perbatasan. Penguatan sinergi antaraktor adalah kunci untuk mewujudkan perbatasan yang berdaulat dan sejahtera.

Saran Pemerintah perlu mempercepat penyelesaian sengketa batas yang tersisa melalui diplomasi yang tegas namun damai untuk menjamin kepastian hukum. BNPP harus meningkatkan efektivitas koordinasi dengan memperkuat kewenangan eksekusi program di lapangan, bukan sekadar koordinasi administratif. Pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan harus difokuskan pada hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah ekspor. Penggunaan teknologi pengawasan perbatasan harus ditingkatkan untuk menutup celah jalur tikus penyelundupan. Terakhir, advokasi kebijakan harus terus didorong untuk menjamin keberlanjutan anggaran pembangunan perbatasan.

Daftar Pustaka

Bangun, B. H., & Kinanti, F. M. (2024). Economic Security in Border Areas: The Fulfillment of Community Welfare. *Lampung Journal of International Law*.

-
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Haller-Trost, R. (1995). *The Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan in the Celebes Sea*. Oxford University Press.
- Kurniawan, H. (2021). Strategi diplomasi perbatasan Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.14710/jhi.v9i1.28754>
- Mustafa, B., & Fitriyah, L. (2023). Analisis Keberlanjutan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Bulaan Indah Kabupaten Pasaman. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Kelautan*, 7(1), 10–22.
- Mutaqin, Z. (2019). Regional development policy and border management in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.22219/jkp.v5i2.10419>
- Nugraha, A. (2018). Advokasi kebijakan publik di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.14710/jip.v6i2.17419>
- Nugroho, F., & Harahap, R. (2023). Collaborative Governance in Border Area Development. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 55–72.
- Prescott, J. R. V. (2014). *Political Frontiers and Boundaries*. Routledge.
- Puryanti, L. (2017). “Garuda Di Dadaku, Malaysia Di Perutku”: Bordering and Social Transformations of Bugis in Indonesia Sebatik Border Island. ProQuest Dissertations.
- Raharjo, S. N. I., & Idris, H. (2025). Indonesia–Malaysia cross-border cooperation in managing mobility of people at disputed border area. *Asia-Pacific Social Science Review*.
- Storper, M. (2011). *Keys to the City: How Economics, Institutions, Social Interaction, and Politics Shape Development*. Princeton University Press.
- Sulaiman, N., Abdullah, Z., & Jamil, M. N. (2023). Spatial Data Governance for Borderland Policy Integration in Southeast Asia. *GeoJournal*, 88(4), 1121–1138. <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10678-9>
- Suryono, A. (2023). Transformasi kebijakan perbatasan: Studi kasus PLBN Entikong dan Motaain. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(1), 33–49.
- Susilo, H., Rijanta, R. R., & Zubaidi, A. (2024). Protracted unresolved segment of Indonesia–Timor Leste land boundary in Noel Besi–Citrana region. *Geopolitics Quarterly*.
-

Vanya, N. L. (2024). Defense diplomacy in the protection of land border between the Republic of Indonesia and Malaysia in North Kalimantan. *Diplomacy and Global Security Journal*.

Wangke, H. (2018). *Kerja Sama Indonesia–Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan*. LIPI Press.